

**Judul** : Tak Cukup WFH, Saatnya Ubah Cara Kerja Birokrasi  
**Tanggal** : Selasa, 31 Maret 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## Tak Cukup WFH, Saatnya Ubah Cara Kerja Birokrasi

Krisis energi dinilai menjadi momentum reformasi birokrasi. Pola bekerja dari rumah saja tidak cukup, diperlukan perubahan budaya birokrasi hingga punya pengukuran kinerja dan pengawasan.

**JAKARTA, KOMPAS** — Krisis energi akibat perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran seharusnya menjadi momentum untuk perubahan cara kerja birokrasi. Tak cukup mendorong aparaturnya sipil negara untuk bekerja dari rumah atau *work from home*/WFH seperti yang tengah dikaji pemerintah. Lebih dari itu, transformasi digital dalam pemerintahan perlu dipercepat.

Seperiti diberitakan, menyikapi konflik berkepanjangan di Timur Tengah, wacana efisiensi bahan bakar minyak (BBM) disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Presiden menyatakan Indonesia harus mengupayakan penghematan BBM. Untuk itu, pemerintah tengah mengkaji skema kerja fleksibel, termasuk opsi satu hari kerja WFH dalam sepekan bagi ASN.

Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Eko Prasjo menilai penerapan kebijakan WFH bagi ASN dalam penghematan BBM bukan tanpa tantangan. Persewaan mendasar justru pada kualitas kinerja birokrasi yang selama ini belum optimal, bahkan saat bekerja dari kantor.

"Jika akan dilaksanakan WFH, harus segera ditetapkan ukuran kinerja individu yang lebih terukur," kata Eko, saat dihubungi, Senin (30/3/2026).

Ia juga mengemukakan adanya pemertaan pekerjaan ASN yang bisa dilakukan dengan WFH. Pekerjaan ASN dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni pelayanan publik langsung, dukungan manajemen, serta penyusunan analisis kebijakan dan keputusan.

Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak dapat diterapkan WFH, kecuali telah sepenuhnya terdigitalisasi. Sementara pekerjaan yang bersifat dukungan manajemen, seperti biro personalia, biro perencanaan, dan biro keuangan, serta penyusunan kebijakan masih memungkinkan untuk dibakukan jarak jauh.

Dalam konteks efisiensi energi, ia menekankan bahwa tujuan utama kebijakan WFH seharusnya bukan sekadar penghematan listrik di kantor, melainkan pengurangan mobilitas pegawai yang berdampak pada konsumsi bahan bakar. Oleh karena itu, skema WFH perlu diterapkan secara bergiliran di antara pegawai sehingga tidak semua ASN bekerja dari rumah pada hari yang sama.

"Perlu pembagian tugas secara bergantian di antara pegawai," ujarnya.

Selain itu, ia pun sepakat dengan usulan agar hari WFH menghindari Senin dan Jumat.



Ratusan aparat sipil negara (ASN) mengikuti acara halal bihalal di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Kota Palu, Sulteng, Senin (30/3/2026). Untuk menghemat konsumsi BBM, pemerintah sedang mengkaji skema kerja fleksibel, termasuk opsi bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN.

"Psikologi sosial orang Indonesia biasanya memanfaatkan hari Jumat atau Senin untuk libur bersama. Jadi, Selasa sampai Kamis bisa jadi pertimbangan," kata Eko.

Lebih jauh, ia melihat kebijakan ini semestinya tidak hanya dipandang sebagai respons jangka pendek terhadap situasi global, tetapi momentum untuk mendorong reformasi birokrasi secara lebih mendasar.

"Momen krisis harusnya jadi momentum perubahan cara kerja birokrasi," ujarnya.

Sebagai contoh, mempercepat transformasi digital dalam pemerintahan, terutama dalam pelayanan publik dan pengambilan kebijakan.

"Proses pelayanan publik harus beralih ke pelayanan digital. Sementara itu, proses bisnis pemerintah sudah harus terintegrasi. Kebijakan dan keputusan sudah bisa dibuat dengan bantuan AI dan *big data*," kata Eko.

### Penghematan di DPR

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR menerapkan kebijakan efisiensi energi, mulai dari pembatasan listrik, AC, lift, hingga jatuhan rapat bagi pimpinan, anggota, dan seluruh pegawai. Langkah ini untuk mengurangi penggunaan BBM dan penghematan anggaran.

Kebijakan efisiensi energi itu tertuang dalam surat Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR tertanggal 27 Maret 2026 yang ditujukan kepada pimpinan DPR, anggota DPR, tenaga ahli, staf administrasi, serta seluruh pejabat dan pegawai.

"Kebijakan yang dilakukan pada beberapa kegiatan terse-

but berdampak langsung pada pengurangan penggunaan energi dari anggaran tanpa mengurangi efektivitas pencapaian kinerja," demikian tertulis dalam surat tersebut.

Sejumlah pembatasan operasional diterapkan, misalnya, listrik di lingkungan kantor wajib dimatikan setelah digunakan, dengan batas maksimal operasional hingga pukul 18.00 WHT. Eskalator, AC, dan lift hanya dioperasikan pada pukul 07.00 hingga 18.00.

Setelah pukul 18.00, operasional lift tidak diberitikan sepenuhnya, tetapi dibatasi hingga hanya 70 persen dari kapasitas normal. Penggunaan telepon dan air juga diminta disesuaikan kebutuhan.

Meski demikian, kegiatan persidangan DPR yang berlangsung melampaui pukul 18.00 diberikan pengecualian dengan mekanisme pemberitahuan kepada Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma.

Efisiensi juga menyangkut penggunaan kendaraan dinas dan BBM. Kendaraan operasional pejabat tinggi madya, pratama, dan administrator diminta lebih hemat dalam penggunaan BBM. Adapun kendaraan operasional pegawai disesuaikan kebijakan kerja fleksibel, seperti WFH atau *work from anywhere* (WFA). Pegawai juga diminta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum.

Penghematan juga diterapkan dalam penyelenggaraan rapat. Untuk rapat internal di setiap unit eselon I, konsumsi dibatasi hanya dalam bentuk makan besar. Sementara itu, rapat yang dilaksanakan secara

darling tidak lagi disediakan jamuan.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyatakan masih menghitung hasil penghematan dari berbagai kebijakan efisiensi tersebut. Namun, berkaitan dengan pos BBM, penghematan tersebut bisa mencapai Rp 1,5 miliar.

"Untuk yang dari BBM sekitar Rp 1,5 miliar. Untuk yang lain masih berproses dan sedang dievaluasi serta dititung," ujar Indra, Minggu (29/3).

Komitmen efisiensi ini akan terus dilakukannya sampai Desember 2026. Untuk saat ini, 20 persen penggunaan listrik DPR juga sudah menggunakan energi dari panel surya.

### Sistem pengawasan

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Deddy Yevri Situmorang, mengingatkan agar kebijakan WFH dijalankan dengan penghitungan matang. Tujuan utama kebijakan WFH harus diperjelas terlebih dahulu, terutama jika dikaitkan dengan upaya penghematan BBM di tengah polusi kelangkaan. Sepakat dengan wacana yang berkembang, WFH tidak dimasukkan hari Jumat dan Senin. Ia menilai, penerapan WFH pada awal atau akhir pekan justru berisiko disalahgunakan menjadi libur panjang sehingga berpotensi menurunkan mobilitas masyarakat dan konsumsi BBM.

"Oleh karena itu, yang paling cocok adalah dari Selasa sampai Kamis. Bisa satu, dua, atau tiga hari," tergantung kebutuhan. Hari Senin digunakan untuk perencanaan dan hari Jumat

untuk evaluasi," ujarnya.

Selain itu, Deddy menekankan pentingnya kesiapan sistem pengawasan agar produktivitas ASN tetap terjaga selama menjalani WFH. "Apakah ada SOP dan mekanisme pengawasan untuk menjaga produktivitas ASN terjamin dan KPI tercapai?" katanya.

Ia juga mengingatkan, tidak semua sektor dapat menerapkan kebijakan kerja jarak jauh, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

Bidang yang terkait pelayanan publik esensial tidak boleh WFH karena akan menyebabkan efek domino bagi publik dan aktivitas ekonomi," ujarnya.

Pengaturan unit kerja yang dapat menjalankan WFH juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan di internal birokrasi. Menurut Deddy, keputusan pembagian kerja WFH sebaiknya disorotkan kepada setiap instansi, kepala daerah, ataupun pimpinan lembaga, bukan ditetapkan secara seragam oleh pemerintah pusat.

"Jangan sampai diberlakukan secara global oleh pemerintah pusat yang bisa berdampak pada kualitas dan keberlangsungan pelayanan publik," katanya.

Lebih jauh, ia menyoroti kesiapan infrastruktur pendukung, seperti perangkat kerja dan konektivitas, yang dinilai menjadi faktor krusial dalam implementasi WFH.

"Hal ini menjadi penting karena tanpa itu sebenarnya sama saja dengan libur sebab tak dapat diawasi dan tak menggerakkan apa pun. Sebut saja libur dan bukan WFH," ujarnya.

(BOW)